

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PENGURUS DESA WISATA TERITIP

**Yogiana Mulyani¹⁾, Tuatul Mahfud²⁾, Henry Winnarko³⁾, Abdul Gafur⁴⁾, Ranti
Rustika⁵⁾, Ishak Nurdin⁶⁾**

^{1,2,3,4,5)} Jurusan Perhotelan, Politeknik Negeri Balikpapan, Indonesia

⁶⁾ Teknik Industri, Universitas Balikpapan, Indonesia

Email: yogiana.mulyani@poltekba.ac.id¹⁾

Asal Negara: Indonesia

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu program strategis dalam pembangunan nasional khususnya pada sektor pariwisata. Pengelolaan desa wisata yang baik akan mendorong pelaksanaan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Meskipun pengurus desa wisata teritip telah memiliki legalitas kepengurusan dari dinas pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan, namun masih memiliki keterbatasan terkait tata kelola dan kelembagaan pengurus desa wisata. Oleh karena itu, program bina desa ini bertujuan untuk memberikan penguatan tata kelola dan kelembagaan pengurus desa wisata teritip. Metode bina desa pada kelurahan teritip ini meliputi penyuluhan, pemberian keterampilan teknis (*technical assistance/TA*), dan pendampingan pasca keterampilan teknis (pasca TA) pengelolaan desa wisata. Hasil program bina desa ini menghasilkan luaran dalam bentuk tersedianya struktur organisasi pengurus desa wisata dan Pokdarwis beserta tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, hasil analisis SWOT pengurus desa wisata sebagai acuan pengembangan bina desa pada tahun berikutnya. Kegiatan ini memberikan implikasi terhadap model program pendampingan pengelola desa wisata yang berfokus pada penguatan tata kelola dan kelembagaan.

Kata kunci: desa wisata; pokdarwis; tata kelola; kelembagaan

ABSTRACT

The development of tourist villages is one of the strategic programs in national development, especially in the tourism sector. Good management of tourist villages will encourage the implementation of sustainable tourism and improve the community's economy. Although the management of the Teritip Tourism Village already has the legality from the tourism office of the Balikpapan City Youth, Sports and Tourism Office (Disporapar), they still have limitations related to governance and institutional management of the tourist village. Therefore, this village development program aims to strengthen the Teritip Tourism Village's governance and institutional management. The village development method in the Teritip sub-district includes counselling, technical skills (technical assistance / TA), and post-technical skills assistance (post-TA) in managing tourism villages. The results of this village development program produce outputs in the form of the availability of an organizational structure for the management of tourist villages and Tourism Awareness Group (Pokdarwis), along with their respective duties and functions. In addition, the results of the SWOT analysis of the tourism village management are used as a reference for the development of village development in the following year. This activity has implications for the tourism village manager assistance program model that focuses on strengthening governance and institutions.

Keywords: *tourism village; tourism awareness group; tourism village management; tourism village institution*

1. PENDAHULUAN

Maraknya wabah pandemic COVID-19 telah memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia, bahkan tidak terkecuali industri pariwisata. Namun, sejak pemberlakuan *new normal* pasca COVID-19 aktivitas ekonomi termasuk didalamnya kegiatan pariwisata sudah mulai perlahan menuju normalisasi. Kemas kegiatan pariwisata pada *new normal* mendorong pengembangan visi aktivitas pariwisata dengan mempertimbangkan aspek penting semasa *new normal* seperti aspek keberlanjutan, teknologi, serta kesehatan dan keamanan (World Travel and Tourism Council (WTTC), 2020). Baru-baru ini sedang muncul

perubahan tren kegiatan pariwisata dari wisata massal (*mass tourism*) menuju wisata alternatif (*alternative tourism*), tren ini memberikan keuntungan bagi desa wisata untuk bisa menjadi pilihan dalam pengembangan pariwisata. Ada banyak studi yang telah menyoroti pentingnya pengembangan desa untuk mendukung perkembangan pariwisata (Gao & Wu, 2017; Sesotyaningtyas & Manaf, 2015; Situmorang et al., 2019; Xi et al., 2014; Zhou et al., 2021). Karena pada desa wisata umumnya memiliki keragaman produk yang dapat ditawarkan kepada wisatawan dengan produk utama yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat di desa. Pengalaman yang diberikan

kepada wisatawan berupa keragaman budaya, keunikan alam, dan karya kreatif di desa. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata di berbagai daerah menjadi hal penting untuk memulihkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Terbitnya SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan Nomor 188.46/047/DPOP tentang Pengukuhan Pengurus Desa Wisata Teritip pada Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah Balikpapan untuk turut serta mengembangkan wisata alternatif dalam bentuk desa wisata di daerah Balikpapan. Sebagai pintu gerbang Kota Balikpapan di wilayah Timur, Teritip memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan. Beberapa potensi wisata di daerah teritip meliputi hutan mangrove, perkebunan, peternakan, religi, pemancingan bambu kuning serta yang terkenal wisata penangkaran buaya. Banyaknya potensi di Kelurahan Teritip sudah selayaknya teritip dapat mengembangkan secara serius desa wisata sebagai salah satu alternatif tujuan wisata para wisatawan.

Secara geografis Kelurahan Teritip merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kelurahan Teritip merupakan daerah pantai yang berada di sebelah timur Balikpapan. Kelurahan Teritip memiliki 33 RT dalam satu kelurahan. Hampir Sebagian besar wilayah kelurahan Teritip merupakan daerah pantai yang memiliki berbagai potensi wisata. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2021 untuk memetakan potensi wisata Kelurahan Teritip ditemukan delapan potensi wisata yang terdiri dari hutan mangrove, bendungan/waduk teritip, penangkaran buaya, pantai teritip (Tanjung Bayur dan Madani), kepiting asoka (Madani) dan pemancingan, pertanian Gunung Bubukan, peternakan Gunung Binjai, dan sejumlah wisata alam seperti kebun karet, buah, dan persawahan).

Mengacu pada kriteria desa wisata, maka Kelurahan Teritip telah memenuhi sebagai desa wisata. Hal ini karena desa wisata merupakan kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Kriteria tersebut meliputi: a. memiliki potensi daya tarik wisata (Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif); b. memiliki komunitas masyarakat; c. memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata; d. memiliki kelembagaan pengelolaan; e. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan f. memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Potensi wisata yang bervariasi di beberapa RT di Kelurahan Teritip menjadi keunggulan dalam

pengembangan desa wisata. Konsep desa wisata yang terintegrasi antar RT dengan berbagai destinasi wisata dapat menarik daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Namun sayangnya, banyaknya potensi wisata tersebut masih belum dikelola dengan baik oleh pengelola wisata. Bahkan beberapa destinasi wisata masih dikelola secara perorangan dan belum banyak melibatkan masyarakat sekitar sebagai basis pengelolaan desa wisata. Salah satu model pengembangan pariwisata yang memberdayakan masyarakat dengan *Community Based Tourism* (CBT) adalah pengembangan desa wisata. Sebagian besar destinasi wisata pada desa wisata teritip berstatus kepemilikan perorangan. Kondisi ini memunculkan sejumlah permasalahan dalam proses pengelolaan desa wisata. Beberapa konflik kepentingan muncul dalam pengelolaan destinasi wisata karena pada hakekatnya pengelolaan wisata membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Misalnya, hal yang paling sederhana bahwa pengembangan wisata membutuhkan akses jalan yang kepemilikannya dari berbagai pihak sehingga tidak bisa dikelola secara perorangan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam upaya pengembangan desa wisata khususnya di Desa Wisata Teritip.

Kapasitas pengelola wisata merupakan aspek penting dalam memajukan desa wisata di Kelurahan Teritip. Kapasitas tersebut mencakup kemampuan tata kelola para pengelola desa wisata. Sejauh ini, destinasi wisata di kelurahan teritip dikelola oleh berbagai lembaga atau organisasi seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Pembudidayaan Ikan Kecil (Pokdakan) Madani. Berdasarkan hasil tinjauan awal tim Program Bina Desa (PBD) berupa hasil wawancara dan observasi dengan pengurus Desa Wisata Teritip dan Lurah Kelurahan Teritip ditemukan sejumlah permasalahan yang meliputi: (1) permasalahan utama yang dihadapi para penelola desa wisata yaitu tata kelola kelembagaan desa wisata belum ada legalitas untuk penetapan Desa Wisata; (2) kurangnya pemahaman mengenai Desa Wisata Dan sadar wisata bagi para pengelola desa wisata; (3) kepengurusan Desa Wisata Teritip sudah ada, namun masih rendah kompetensi untuk pengelolaan kelembagaannya; (4) rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai basis konsep *Community Based Tourism* (CBT) pada pengembangan Desa Wisata Teritip.

Kondisi pandemic saat ini, peningkatan kapasitas tata kelola desa wisata menjadi hal yang penting terutana untuk menarik kembali para pengunjung di era *new normal*. Pengelolaan yang baik akan mendorong terciptanya aksesibilitas, amenitas, dan atraksi wisata yang dapat memuaskan wisatawan. Selain itu, pengelolaan desa wisata di era *new normal* harus tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk memberikan jaminan terhadap kebersihan dan keselamatan para pengunjung. Oleh karena itu, pendampingan para pengelola desa wisata

teritip guna meningkatkan kapasitas tata kelola desa wisata sangat perlu dilakukan.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Permasalahan mitra terkait lemahnya kelembagaan dan tata kelola pengurus desa wisata teritip diperlukan solusi pemecahan masalah dalam bentuk (1) pemberian pemahaman mengenai pentingnya sadar wisata; (2) pemberian keterampilan teknis (*technical assistance/TA*) pengelolaan desa wisata; dan (3) pendampingan pasca keterampilan teknis (pasca TA).

Program penyuluhan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sadar wisata merupakan solusi terhadap permasalahan mitra yang berkaitan dengan pentingnya kesadaran dan pengetahuan tentang sadar wisata bagi masyarakat. Selanjutnya, setelah dilakukannya upaya merubah pola pikir para pengelola Desa Wisata Teritip terkait pentingnya kesadaran dan pengetahuan tentang wisata maka ditindaklanjuti dengan pembekalan keterampilan teknis dalam pengelolaan desa wisata yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan tata kelola, peningkatan kualitas SDM, dan penerapan prinsip CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability*).

Tahap akhir program bina desa ini dilakukan dalam bentuk pendampingan pasca keterampilan teknis (pasca TA). Kegiatan pasca pelatihan keterampilan teknis akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan pasca TA. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk menadampingi para pengurus Desa Wisata Teritip dalam hal tata kelola desa wisata. Para pengurus melakukan tata kelola dibawah pengawasan dan pendampingan dari tim Program Bina Desa (PBD).

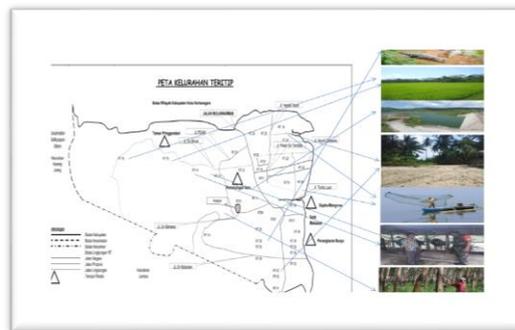
Pelaksanaan Program Bina Desa (PBD) “Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Desa Wisata Teritip” dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: (1) survei; (2) *socialization* (sosialisasi program pelatihan/pendampingan); (3) *procurement* (pengadaan alat dan bahan); (4) pelatihan/penyuluhan (teori); (5) *coaching* (pendampingan).

Kegiatan survei merupakan kegiatan awal untuk melakukan studi kelayakan potensi wisata, kebutuhan pelaksanaan pelatihan (*need assesment*), peserta yang akan dilibatkan, dan perizinan dari representasi masyarakat setempat. Pada tahap *socialization* bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada peserta pelatihan/pendampingan terhadap program pelatihan yang akan diselenggarakan. Selanjutnya, *procurement* untuk melakukan pengadaan barang dan bahan yang tepat sesuai dengan *spek* yang dibutuhkan, harga yang cocok dan efisien serta transparan dalam mendukung kegiatan Program Bina Desa tersebut. Tahap berikutnya yaitu kegiatan pelatihan, kegiatan ini merupakan penyampaian materi mendasar terkait tata

kelola desa wisata yang meliputi desa wisata, sadar wisata dan sapta pesona, kelompok sadar wisata (pokdarwis), CHSE dan pelayanan prima. Tahap akhir yaitu kegiatan pendampingan (*Coaching*). Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi pengurus desa wisata dalam mengimplementasikan pengelolaan desa wisata.

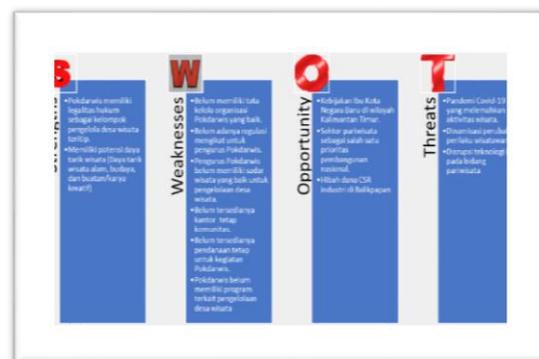
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program Bina Desa “Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Desa Wisata Teritip” merupakan solusi atas lemahnya kelembagaan dan tata Kelola pengurus desa wisata teritip. Langkah awal program ini dilakukan identifikasi awal terkait identifikasi potensi dan need assesment pengembangan desa wisata teritip. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh data potensi desa wisata teritip yang meliputi: (1) Hutan Mangrove (Pendopo Teritip); (2) Bendungan/Waduk Teritip; (3) Penangkaran Buaya; (4) Pantai Teritip (Tanjung Bayur dan Madani); (5) Kepiting Asoka (Madani) dan Pemancingan; (6) Pertanian Gunung Bubukan; (7) Peternakan Gunung Binjai; dan (8) Wisata Alam (Kebun Karet, Buah, Persawahan) Gunung Binjai. Pada Gambr 1 menunjukkan sebaran beberapa daya tarik wisata di Kelurahan Teritip.



Gambar 1. Potensi desa wisata teritip

Selain itu, hasil eksplorasi SWOT terkait pengurus desa wisata teritip dalam mengembangkan desa wisata di kelurahan teritip ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil analisis SWOT pengurus desa wisata teritip

Selanjutnya, program bina desa melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan sadar wisata dan penguatan kelembagaan pengurus desa wisata teritip. Secara garis besar, program bina desa ini terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu (1) pemberian pemahaman mengenai pentingnya sadar wisata; (2) pemberian keterampilan teknis (*technical assistance/TA*) pengelolaan desa wisata; dan (3) pendampingan pasca keterampilan teknis (pasca TA).

3.1. Penyuluhan sadar wisata

Langkah awal yang dinilai strategis dalam menggerakkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) yaitu penguatan kesadaran wisata masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata merupakan hal yang mutlak harus terpenuhi. Satu dari enam kriteria desa wisata menyebutkan bahwa sebuah desa dapat disebut sebagai desa wisata jika memiliki komunitas masyarakat. Adanya komunitas masyarakat belumlah cukup tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Sementara itu, keterlibatan masyarakat tidak akan muncul jika kesadaran masyarakat terkait wisata belum terbentuk.

Oleh karena itu, kegiatan awal program bina desa di desa wisata teritip diawali dengan program penyuluhan dengan tema “Membangun Masyarakat Sadar Wisata”. Ada banyak studi yang mengkaji pentingnya membangun sadar wisata dalam pengembangan wisata. Salah satunya studi yang dilakukan oleh Haryanto (2017) menyoroti upaya membangun karakter sadar wisata masyarakat di destinasi melalui kearifan lokal Sunda. Kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan sadar wisata dan sapta pesona telah berlangsung lama pada tahun 1990. Program sadar wisata dan sapta pesona (SWSP) merupakan modal promosi yang paling efektif. Program SWSP tersebut merupakan program penyuluhan dari kementerian pariwisata (Kemenpar) yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata dan masyarakat didestinasikan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan wisatawan ketika berkunjung di destinasi, sehingga negara Indonesia dapat setara dengan negara tetangga lainnya dalam persaingan pasar wisata di Asia.

Pada prinsipnya, sadar wisata merupakan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan suatu wilayah. Kesadaran dalam sadar wisata menuntun masyarakat berperan dalam dua hal yaitu: (1) masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (*host*) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam slogan Sapta Pesona; (2) masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk

melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air.

Sadar wisata erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat. Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan menjadi sorotan penting menurut pakar kepariwisataan dunia (Jamal & Getz, 1995). Pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut (Sunaryo, 2013). Disamping itu, masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta (Sunaryo, 2013).

3.2. Pelatihan keterampilan teknis (*technical assistance/TA*) pengelolaan desa wisata

Kegiatan pelatihan ini merupakan solusi atas permasalahan mitra pengurus desa wisata teritip tentang tata kelola dan kelembagaan desa wisata di kelurahan teritip. Seperti halnya informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi menyebutkan bahwa permasalahan mitra meliputi lemahnya kelembagaan pengurus desa wisata yang belum memiliki deskripsi tugas pada masing-masing struktur organisasi. Secara legal formal, pengurus desa wisata telah memiliki SK penetapan sebagai pengurus desa wisata di kelurahan teritip yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata Kota Balikpapan. Belum siapnya kelembagaan pengurus memberikan dampak terhadap tata kelola pengurus desa wisata yang belum baik.

Permasalahan mitra tersebut menjadi acuan untuk menentukan topik materi pelatihan kepada pengurus desa wisata teritip. Adapun topik materi pelatihan Program Bina Desa terdiri dari: (1) Desa Wisata dalam Sistem Kepariwisata; (2) Kelembagaan Desa Wisata; (3) Penerapan CHSE; dan (4) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Materi desa wisata dalam sistem kepariwisataan memuat bagaimana kecenderungan wisatawan di masa akan datang yang berdampak dengan perkembangan desa wisata saat ini yang mulai banyak diminati sehingga perlu lebih dieksplorasi, dikemas dan dipresentasikan secara lebih baik. Pada materi kelembagaan desa wisata memuat empat prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan yang terdiri dari *economically feasible*, *environmentally feasible*, *socially acceptable*, dan *technologically appropriate*. Selain itu, pengembangan desa wisata terdiri dari sembilan langkah yaitu (1) komitmen, (2) identifikasi potensi, (3) analisis permasalahan, (4) solusi dampak,

(5) regulasi, (6) integrasi-kolaborasi, (7) peningkatan kapasitas, (8) publikasi dan promosi, dan (9) berkelanjutan.

Sementara itu, pada materi penerapan CHSE memuat pentingnya implementasi prinsip-prinsip CHSE pada operasional layanan wisata di desa wisata selama masa new normal. Penerapan CHSE ini memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Sertifikasi CHSE bagi desa wisata atau daya tarik wisata perlu mendapatkan prioritas pelaksanaannya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Menurut Kemenparekraf (2012) menyebutkan bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Hadirnya Pokdarwis turut mendorong percepatan pengelolaan destinasi wisata di Indonesia. secara kelembagaan, Pokdarwis merupakan kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di daerahnya.

Dalam struktur kelembagaan di desa wisata teritip, Pokdarwis merupakan pengelola pada masing-masing daya tarik wisata (DTW) di kelurahan teritip. Sementara itu, kedudukan pengurus desa wisata teritip menaungi seluruh Pokdarwis di kelurahan teritip. Sehingga, hadirnya pengurus desa wisata teritip akan memperkuat jalur koordinasi antar Pokdarwis untuk mengembangkan daya tarik wisata yang berada pada Kawasan desa wisata teritip.

3.3. Pendampingan pasca keterampilan teknis (pasca TA) pengelolaan desa wisata

Pendekatan metode pendampingan yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah sebuah pendekatan yang mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengembangan sebuah kegiatan. Secara prinsip PRA dalam konteks pemberdayaan, seluruh orang terutama yang tergabung dalam kepengurusan desa wisata Teritip ikut aktif dalam dalam setiap kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring. Selain itu, kegiatan pendampingan bisa juga dikatakan sebagai kegiatan mentoring yakni sebagai sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya. Kegiatan pendampingan di desa wisata teritip dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan melakukan memberikan

pengarahan dan penilaian (*coaching*) terhadap hasil penerapan dari pelatihan yang sudah diterima di lapangan.

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mendorong keberhasilan praktek pengelolaan desa wisata pada masing-masing Pokdarwis. Secara khusus, poses pendampingan pengelolaan desa wisata memastikan praktek terbaik terkait tata Kelola desa wisata, penerapan sistem kelembagaan pada masing-masing Pokdarwis, penerapan CHSE, dan implementasi aktivitas sadar wisata pada pengelola desa wisata di Kelurahan Teritip.

Pendampingan yang dilakukan terhadap pengurus desa wisata Teritip terutama dalam menganalisa dari susunan kepengurusan yang ada serta membuat uraian tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan yang ada dalam kepengurusannya. Hal ini penting dikarenakan setiap orang yang terlibat dalam kepengurusan harus mengetahui apa yang harus dibuat atau dikerjakan dalam menjalankan organisasinya. Selanjutnya dilakukan pendampingan dalam pembuatan program kerja jangka panjang sesuai dengan jangka waktu kepengurusan dan program kerja jangka pendek untuk setiap tahun. Program kerja menjadi hal sangat penting dalam suatu organisasi dimana akan mengarahkan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Setiap kelompok kerja (pokja) yang ada akan mengusulkan minimal dua kegiatan untuk setiap tahunnya.

Selain itu, pendampingan juga dilakukan untuk mendampingi pembukuan administrasi kepengurusan desa wisata juga harus disiapkan seperti buku surat masuk dan keluar, buku notulen rapat, buku kas, dan lainnya. Hal terakhir yang dilakukan dalam kegiatan pendampingan yaitu melakukan analisa SWOT terhadap keberadaan desa wisata teritip yang akan dikembangkan keberadaannya sehingga bisa dihasilkan kajian sederhana yang akan menjadi bahan masukan terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan desa wisata teritip ke depannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Program bina desa di desa wisata teritip memiliki peran penting untuk menguatkan tata Kelola dan kelembagaan pengurus desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Teritip. Kegiatan program bina desa ini meliputi (1) pemberian pemahaman mengenai pentingnya sadar wisata dalam bentuk penyuluhan; (2) pemberian keterampilan teknis (*technical assistance/TA*) pengelolaan desa wisata; dan (3) pendampingan pasca keterampilan teknis (pasca TA). Hasil kegiatan ini menghasilkan luaran dalam bentuk tersedianya struktur organisasi pengurus desa wisata dan Pokdarwis beserta tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, hasil analisis SWOT pengurus desa wisata

sebagai acuan pengembangan bina desa pada tahun berikutnya. Kegiatan ini memberikan implikasi terhadap model program pendampingan pengelola desa wisata yang berfokus pada penguatan tata kelola dan kelembagaan.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100910>

DAFTAR PUSTAKA

- Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. *Tourism Management*, 63, 223–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.003>
- Haryanto, O. I. . (2017). Membangun karakter sadar wisata masyarakat di destinasi melalui kearifan lokal Sunda. *Pariwisata*, 4(1), 32–39. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/1830>
- Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1), 186–204. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00067-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00067-3)
- Kemenparekraf. (2012). *Buku pedoman kelompok sadar wisata*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Sesotyaningtyas, M., & Manaf, A. (2015). Analysis of Sustainable Tourism Village Development at Kutoharjo Village, Kendal Regency of Central Java. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184, 273–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.091>
- Situmorang, R., Trilaksono, T., & Japutra, A. (2019). Friend or Foe? The complex relationship between indigenous people and policymakers regarding rural tourism in Indonesia. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 39, 20–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.02.001>
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- World Travel and Tourism Council (WTTC). (2020). *WTTC Vision and Recommendations for Travel and Tourism Recovery Post COVID-19*. <https://wtcc.org/en-gb/COVID-19/Recovery-Post-COVID-19>
- Xi, J., Zhao, M., Ge, Q., & Kong, Q. (2014). Changes in land use of a village driven by over 25 years of tourism: The case of Gougezhuang village, China. *Land Use Policy*, 40, 119–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.11.014>
- Zhou, L., Wall, G., Zhang, D., & Cheng, X. (2021). Tourism and the (re)making of rural places: The cases of two Chinese villages. *Tourism Management Perspectives*, 40, 100910.